P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

PENGARUH *FISCAL STRESS*, SiLPA, DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DI SUMATERA SELATAN

Muhammad Yusuf Halim Albar[1)], Rita Martini[2)], Indriani Indah Astuti[3)]
[1,2,3)]Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya
Email : yusufhalim.scholar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Fiscal Stress*, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Kemandirian Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah periode 2022–2025. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh, dengan melibatkan seluruh 17 pemerintah kabupaten/kota sehingga diperoleh 68 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, *Fiscal Stress* dan Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran, sedangkan SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Secara simultan, *Fiscal Stress*, SiLPA, dan Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SiLPA merupakan satu-satunya variabel yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap Penyerapan Anggaran dalam model penelitian.
Kata Kunci: *Fiscal Stress, SiLPA, Kemandirian Keuangan, Penyerapan Anggaran*

Abstract

This study aims to examine the effects of Fiscal Stress, Budget Surplus (SiLPA), and Financial Independence on Budget Absorption in regency and municipal governments in South Sumatra Province, Indonesia. This quantitative study uses secondary data obtained from Audit Reports on Local Government Financial Statements for the 2022–2025 period. Saturated sampling was employed, covering all 17 regency and municipal governments and yielding 68 observations. The data were analyzed using panel data regression with EViews 13. The results indicate that, partially, Fiscal Stress and Financial Independence do not have statistically significant effects on Budget Absorption, whereas SiLPA has a negative and statistically significant effect. Simultaneously, Fiscal Stress, SiLPA, and Financial Independence do not have a statistically significant effect on Budget Absorption at the 5% significance level. These findings indicate that SiLPA is the only variable with a statistically significant partial effect on Budget Absorption in the research model.
Keywords: *Fiscal Stress, SiLPA, Financial Independence, Budget Absorption*

1. PENDAHULUAN

Terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik sebagai salah satu unsur utama dalam tata kelola pemerintahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dengan menekankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal agar pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara efektif untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dalam implementasinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Efektivitas pelaksanaan APBD salah satunya tercermin dari tingkat penyerapan anggaran. Tingkat penyerapan anggaran menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah ditetapkan direalisasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Namun, penyerapan anggaran tidak hanya berkaitan dengan besarnya realisasi belanja, tetapi juga dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi penyerapan anggaran adalah *Fiscal Stress*. *Fiscal Stress* merupakan kondisi ketika pemerintah menghadapi tekanan fiskal akibat ketidakseimbangan antara kapasitas pendapatan dan kebutuhan belanja yang harus dipenuhi (Arnett, 2011) . Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dapat menghadapi keterbatasan fiskal yang memengaruhi pelaksanaan program serta realisasi anggaran. Oleh karena itu, tingkat tekanan fiskal diperkirakan memiliki hubungan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran.

Faktor lain yang diduga berkaitan dengan penyerapan anggaran adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode anggaran. SiLPA dapat menjadi sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya. Besarnya SiLPA juga dapat berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan realisasi belanja pemerintah daerah. Oleh karena itu, SiLPA perlu dikaji untuk mengetahui hubungannya dengan tingkat penyerapan anggaran.

Selain *Fiscal Stress* dan SiLPA, kemandirian keuangan juga diperkirakan berkaitan dengan penyerapan anggaran. Kemandirian keuangan mengintepretasikan kemampuan pemerintahan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan daerah melalui pemasukan yang berasal dari daerah sendiri. Tingkat kemandirian keuangan dapat mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Namun, tingginya kemandirian keuangan tidak serta-merta menjamin optimalnya penyerapan anggaran karena realisasi belanja juga berkaitan dengan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, pengaruh kemandirian keuangan terhadap penyerapan anggaran perlu diuji secara empiris.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan penyerapan anggaran masih menunjukkan hasil yang beragam. Perbedaan hasil penelitian mengenai *Fiscal Stress* dan SiLPA menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut terhadap hubungan kedua variabel tersebut dengan penyerapan anggaran. Selain itu, kemandirian keuangan juga perlu dikaji untuk mengetahui apakah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan melalui pendapatan sendiri berkaitan dengan tingkat penyerapan anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pengujian *Fiscal Stress*, SiLPA, dan kemandirian keuangan terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2022–2025. Perbedaan kombinasi variabel dan periode penelitian menjadi dasar untuk menguji kembali hubungan ketiga variabel independen tersebut dengan penyerapan anggaran pemerintah daerah.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan, pengelolaan anggaran daerah dapat ditinjau melalui realisasi belanja, anggaran belanja, SiLPA, serta pendapatan daerah. Informasi tersebut digunakan untuk menguji hubungan *Fiscal Stress*, SiLPA, dan kemandirian keuangan dengan penyerapan anggaran selama periode penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran akan keterkaitan ketiga variabel dengan penyerapan anggaran

pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penambahan variabel kemandirian keuangan dalam menguji pengaruh *Fiscal Stress* dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap penyerapan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian terdahulu oleh (Elpana et al., 2024) serta (Jayenchi et al., 2026) telah mengkaji hubungan *Fiscal Stress* dan SiLPA dengan penyerapan anggaran pada wilayah yang sama, tetapi menggunakan periode pengamatan dan kombinasi variabel yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas pengujian empiris dengan memasukkan aspek kemandirian keuangan serta menggunakan data periode 2022–2025. Hasil ini diharapkan dapat menjadi tambahan bukti empiris mengenai keterkaitan tekanan fiskal, SiLPA, dan kemandirian keuangan dengan penyerapan anggaran pemerintah daerah.

2. TELAAH LITERATUR

Agency Theory

Agency Theory menelaah hubungan antara dua subject, yaitu principal yang mendelegasikan wewenang kepada agent untuk mengelola resources serta mengambil keputusan atas nama principal (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks sektor publik, masyarakat bertindak sebagai principal yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah sebagai agent untuk mengelola keuangan publik secara akuntabel. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah adalah merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Oleh karena itu, tingkat penyerapan anggaran dapat mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah menjalankan amanah masyarakat dalam mengelola sumber daya publik.

Berdasarkan perspektif *Agency Theory*, kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran dapat berkaitan dengan berbagai kondisi fiskal yang dihadapi. *Fiscal Stress* berpotensi membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja, sedangkan SiLPA mencerminkan sisa anggaran yang dapat berkaitan dengan pelaksanaan anggaran. Selain itu, kemandirian keuangan menjelaskan kekuatan pemda dalam mendanai kebutuhan pemerintahan melalui pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri (Mahmudi, 2019). Sehingga, *Agency Theory* digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan hubungan *Fiscal Stress*, SiLPA, dan kemandirian keuangan dengan penyerapan anggaran.

Resource Dependence Theory

Resource Dependence Theory (RDT) menyatakan bahwa keberlangsungan organisasi dipengaruhi oleh ketergantungannya terhadap sumber daya eksternal serta kemampuannya memperoleh dan mengelola sumber daya tersebut (Pfeffer, 1978). Dalam sektor publik, pemerintah daerah memerlukan berbagai sumber pembiayaan guna menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

RDT digunakan sebagai teori pendukung untuk menjelaskan pentingnya ketersediaan dan pengelolaan sumber daya keuangan daerah pada penelitian ini. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan rendah lebih bergantung pada pendapatan transfer untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kondisi tersebut relevan untuk dikaji karena kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri dapat berkaitan dengan kemampuannya merencanakan dan merealisasikan belanja. Selain itu, keterbatasan sumber daya keuangan juga dapat berkaitan dengan tekanan fiskal (*Fiscal Stress*) yang dihadapi pemerintah daerah. Oleh karena itu, RDT mendukung penjelasan mengenai hubungan kemandirian keuangan dan kondisi sumber daya keuangan dengan penyerapan anggaran pemerintah daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Penyerapan Anggaran

Berlandas pada *Resource Dependence Theory*, pemerintah daerah (Sumatera Selatan)

bergantung pada sumber daya keuangan untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Ketika pemerintah daerah dihadapi dengan kondisi *Fiscal Stress*, kemampuan finansialnya untuk memenuhi kebutuhan belanja dapat mengalami tekanan. Kondisi ini dapat memengaruhi pelaksanaan program pemerintah dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, *Fiscal Stress* memiliki keterkaitan dengan tingkat penyerapan anggaran pemerintah daerah.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengindikaskan inkonsistensi. (Fitri et al., 2025) menemukan pengaruh negatif signifikan *Fiscal Stress* pada penyerapan anggaran pemerintah daerah. Di sisi lain, (Anggraini et al., 2024) dan (Hanum & Ramadana, 2025) menemukan bahwa *Fiscal Stress* tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Pada konteks yang lebih dekat dengan penelitian ini, (Elpana et al., 2024) juga telah menguji hubungan *Fiscal Stress* dengan penyerapan anggaran pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Perbedaan keluaran penelitian ini mengindikasikan bahwa pengaruh *Fiscal Stress* pada penyerapan anggaran masih perlu ditelaah lebih dalam. Oleh karena itu, hipotesis pertama disimpulkan sebagai berikut.

H1: *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengaruh SiLPA terhadap Penyerapan Anggaran

SiLPA merupakan sisa anggaran dari periode terdahulu yang dapat berkaitan dengan ketersediaan sumber pembiayaan pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif *Resource Dependence Theory*, ketersediaan sumber daya keuangan merupakan salah satu aspek yang dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya secara efektif.

Amellya et al., 2023 menemukan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sisa anggaran memiliki hubungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran. Namun, penelitian tersebut tidak secara langsung memberikan bukti bahwa pengaruh yang sama berlaku pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Sehingga, penelitian ini menguji kembali hubungan SiLPA dengan penyerapan anggaran dalam konteks pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut.

H2: SiLPA berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran

Kemandiriankeuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Dalam perspektif *Resource Dependence Theory*, keberlangsungan organisasi dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya serta kemampuan organisasi dalam mengelolanya (Hillman et al., 2009). Pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi memiliki kapasitas pendapatan sendiri yang lebih besar untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.

Tingginya kemandirian keuangan tidak secara otomatis menyebabkan penyerapan anggaran menjadi tinggi atau rendah. Penyerapan anggaran juga dapat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan kegiatan, serta faktor administratif lainnya. Oleh sebab itu, hubungan kemandirian keuangan dengan penyerapan anggaran perlu diuji secara empiris.

Penelitian ini memasukkan kemandirian keuangan ke dalam model bersama *Fiscal Stress* dan SiLPA untuk menguji pengaruhnya terhadap penyerapan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga adalah sebagai berikut.

H3: Kemandirian keuangan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengaruh *Fiscal Stress*, SiLPA, dan Kemandirian Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran pemerintah daerah dapat berkaitan dengan berbagai kondisi fiskal dan kemampuan pengelolaan sumber daya keuangan. Berdasarkan *Agency Theory*, agen harus mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya publik dengan merealisasikan anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, *Resource Dependence Theory* menjelaskan bahwa kemampuan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya berkaitan dengan ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan.

Fiscal Stress menggambarkan tekanan fiskal yang dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja. SiLPA mencerminkan sisa anggaran yang dapat berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, sedangkan Kemandirian Keuangan menunjukan kemampuan dalam pembiayaan kebutuhan menggunakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Ketiga variabel tersebut merepresentasikan aspek yang berbeda dalam kondisi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

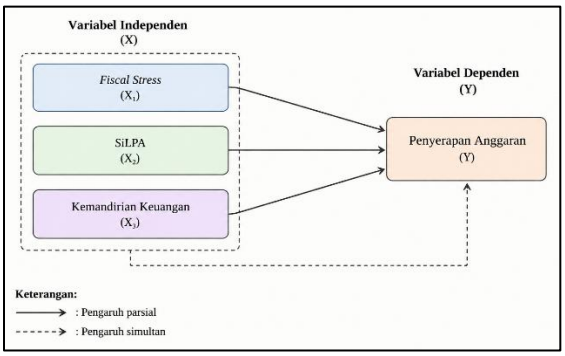
Secara bersama-sama, *Fiscal Stress*, SiLPA, dan Kemandirian Keuangan diperkirakan berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran. Namun, hubungan tersebut juga dapat terpengaruh oleh hal lain, seperti kualitas rencana dan SDM, koordinasi antarperangkat daerah, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, pengujian secara simultan diperlukan untuk menguji apakah ketiga variabel independen tersebut berpengaruh pada Penyerapan Anggaran. Berikut hipotesis keempat:

H4: *Fiscal Stress*, SiLPA, dan Kemandirian Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Kerangka Pemikiran

Kondisi fiskal dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dapat memengaruhi pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. *Fiscal Stress* menggambarkan tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, sedangkan SiLPA menggambarkan kondisi sisa anggaran yang dapat berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.

Dalam penelitian ini, *Fiscal Stress*, SiLPA, dan Kemandirian Keuangan ditempatkan sebagai variabel independen yang diduga berhubungan dengan Penyerapan Anggaran sebagai variabel dependen. Hubungan antarvariabel tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tekanan fiskal, kondisi sisa anggaran, serta kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan melalui pendapatan sendiri dapat berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran. Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Sumber: Diolah peneliti, 2026.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini menguji pengaruh *Fiscal Stress*, SiLPA, dan Kemandirian Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2022–2025. Pengujian dilakukan secara parsial maupun simultan

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap Penyerapan Anggaran.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji efek dari *Fiscal Stress*, SiLPA, dan Kemandirian Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran pemerintah daerah dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari LHP LKPD.

Populasi yang dipakai mencakup 17 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri atas 13 kabupaten dan 4 kota, dengan menggunakan sampling jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan objek penelitian. Periode pengamatan mencakup tahun 2022–2025 sehingga diperoleh 68 observasi (17 pemerintah daerah × 4 tahun).

Variabel dependen yang digunakan adalah Penyerapan Anggaran, sedangkan variabel independen berupa *Fiscal Stress*, SiLPA, dan Kemandirian Keuangan.

Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel, dengan tahapan meliputi statistik deskriptif dan pemilihan model panel melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2). Seluruh proses dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews versi 13.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel disajikan pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Skala Pengukuran
Y	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja pemerintah daerah.	Rasio (%)
X1	Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah.	Rasio (%)
X2	Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada tahun berjalan.	Rasio (nominal rupiah)
X3	Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer.	Rasio (%)

Berdasarkan Tabel 1, penyerapan anggaran diukur melalui perbandingan realisasi belanja dengan anggaran belanja, sedangkan *Fiscal Stress* diukur berdasarkan perbandingan PAD dengan total pendapatan daerah. SiLPA diukur menggunakan nilai SiLPA tahun berjalan dalam satuan rupiah, sementara kemandirian keuangan diukur melalui perbandingan PAD dengan pendapatan transfer. Seluruh variabel menggunakan skala rasio karena memiliki nilai nol absolut dan memungkinkan perbandingan secara kuantitatif.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan jenis melalui nilai minimum, maksimum, mean, median, dan standar deviasi. Penelitian ini menggunakan 68 observasi yang terdiri atas variabel penyerapan anggaran sebagai variabel dependen serta *Fiscal Stress*, SiLPA, dan kemandirian keuangan sebagai variabel independen. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik	Y	X1	X2	X3
Mean	0,879	0,099	140.675.298.807,32	0,128
Median	0,891	0,084	77.819.119.750,32	0,105
Maks	0,957	0,383	879.327.121.622,00	0,730
Min	0,653	0,035	188.615.937,00	0,037
Std. Dev.	0,056	0,070	179.689.399.947,55	0,130
Observ	68	68	68	68

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, variabel penyerapan anggaran (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,878582 atau 87,86%, dengan nilai minimum sebesar 0,653239 atau 65,32% dan maksimum sebesar 0,956643 atau 95,66%. Standar deviasi sebesar 0,056206 menunjukkan adanya variasi tingkat penyerapan anggaran antardaerah selama periode penelitian.

Variabel *Fiscal Stress* (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,099304, dengan nilai minimum sebesar 0,035331 dan maksimum sebesar 0,382647. Standar deviasi sebesar 0,069972 menunjukkan adanya variasi tingkat *Fiscal Stress* pada daerah yang diamati.

Selanjutnya, variabel SiLPA (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp140,68 miliar, dengan nilai minimum sebesar Rp188,62 juta dan maksimum sebesar Rp879,33 miliar. Standar deviasi sebesar Rp179,69 miliar menunjukkan bahwa nilai SiLPA memiliki penyebaran yang cukup besar antardaerah selama periode penelitian.

Sementara itu, variabel kemandirian keuangan (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,128138 atau 12,81%, dengan nilai minimum sebesar 0,036928 atau 3,69% dan maksimum sebesar 0,729735 atau 72,97%. Standar deviasi sebesar 0,129646 menunjukkan adanya variasi tingkat kemandirian keuangan antardaerah.

Model Regresi Data Panel

Pemilihan berjalan guna menentukan model estimasi yang tepat. Tahapannya berupa Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Hasil pengujian pemilihan model disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian	Probabilitas	Model Terpilih
Chow	0,0382	FEM
Hausman	0,1375	REM
(LM)	0,2622	CEM

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, Uji Chow menghasilkan nilai prob 0,0382, dibawah tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menampilkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Lalu, Uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,1375, lebih besar dari 0,05, tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol yang mendukung penggunaan *Random Effect Model* (REM). Sementara itu, Uji Lagrange Multiplier (LM) menghasilkan nilai probabilitas Breusch–Pagan pada kolom *Both* sebesar 0,2622, lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat cukup bukti untuk memilih REM dibandingkan CEM.

Meskipun hasil pengujian pemilihan model belum menunjukkan kesimpulan yang konsisten, penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan mempertimbangkan hasil Uji Chow yang menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individual antardaerah yang signifikan secara statistik. Secara teoritis, FEM memungkinkan setiap daerah memiliki intersep yang berbeda untuk mengakomodasi karakteristik individual yang tidak teramati dan bersifat konstan sepanjang periode penelitian. Pendekatan ini relevan apabila karakteristik khusus masing-masing daerah diduga berkorelasi dengan variabel independen. Oleh karena itu,

penggunaan FEM perlu disertai justifikasi metodologis yang memadai mengingat hasil Uji Hausman dan LM tidak secara langsung mendukung pemilihan model tersebut.

Uji Multikolinearitas

Analisis ini diimplementasikan untuk mencari indikasi korelasi tinggi yang ada pada setiap variabel. Pengujian memanfaatkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang ada pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	VIF	Keterangan
Fiscal Stress (X1)	35,03	Terindikasi multikolinearitas tinggi
SiLPA (X2)	1,02	Tidak terindikasi multikolinearitas tinggi
Kemandirian Keuangan (X3)	34,98	Terindikasi multikolinearitas tinggi

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 4, nilai VIF *Fiscal Stress* (X1) sebesar 35,03 dan kemandirian keuangan (X3) sebesar 34,98, sedangkan SiLPA (X2) memiliki nilai VIF sebesar 1,02. Dengan menggunakan batas VIF sebesar 10, hasil tersebut menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas tinggi pada variabel *Fiscal Stress* dan kemandirian keuangan. Sementara itu, variabel SiLPA tidak menunjukkan indikasi multikolinearitas tinggi. Demikian, hasil pengujian menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas tinggi pada variabel *Fiscal Stress* dan kemandirian keuangan.

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel *Fiscal Stress* memiliki nilai VIF sebesar 35,03 dan kemandirian keuangan sebesar 34,98, sedangkan SiLPA memiliki nilai VIF sebesar 1,02. Nilai VIF *Fiscal Stress* dan kemandirian keuangan yang melebihi batas 10 mengindikasikan adanya multikolinearitas yang tinggi di antara variabel independen. Kondisi ini diduga berkaitan dengan penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen pembilang pada kedua indikator tersebut. Multikolinearitas dapat memengaruhi kestabilan estimasi koefisien regresi dan ketepatan standar error, sehingga interpretasi pengaruh parsial kedua variabel perlu dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, spesifikasi model dan pengukuran variabel perlu ditinjau kembali sebelum hasil regresi diinterpretasikan lebih lanjut.

***Fixed Effect Model* (FEM)**

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) menggunakan EViews 13, diperoleh hasil estimasi koefisien, *t-statistic*, dan probabilitas masing-masing variabel sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob.
Fiscal Stress (X1)	-1,206237	-1,475611	0,146579
SiLPA (X2)	$-1{,}698573 \times 10^{-13}$	-2,443081	0,018292
Kemandirian Keuangan (X3)	0,247377	0,600974	0,550685
R-squared	0,408871		
F-statistic	1,747400		
Prob(F-statistic)	0,060401		

Sumber: Data diolah, 2026.

Secara parsial, *Fiscal Stress* memiliki koefisien sebesar −1,206237 dengan nilai probabilitas 0,146579 (> 0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. SiLPA memiliki koefisien sebesar $-1{,}698573 \times 10^{-13}$ dengan nilai probabilitas 0,018292 (< 0,05), sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sementara itu, kemandirian keuangan memiliki koefisien sebesar 0,247377 dengan nilai probabilitas 0,550685 (> 0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Secara simultan, nilai *F-statistic* sebesar 1,747400 dengan Prob(F-statistic) sebesar 0,060401 (> 0,05) menunjukkan bahwa model tidak signifikan secara simultan pada tingkat signifikansi 5%.

Nilai *R-squared* sebesar 0,408871 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan sebesar 40,89% terhadap variasi penyerapan anggaran. Sementara itu, 59,11% sisanya berkaitan dengan faktor lain di luar model dan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh spesifikasi model.

Hasil pengujian pemilihan model regresi data panel menunjukkan bahwa uji Chow menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0382 (< 0,05), sehingga FEM lebih tepat dibandingkan CEM berdasarkan pengujian tersebut. Namun, uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,1375 (> 0,05), sehingga tidak terdapat cukup bukti untuk menolak REM dibandingkan FEM. Selanjutnya, uji Lagrange Multiplier (LM) menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,2622 (> 0,05), sehingga tidak terdapat cukup bukti untuk memilih REM dibandingkan CEM. Dengan demikian, hasil ketiga pengujian belum memberikan kesimpulan yang konsisten mengenai model regresi data panel yang paling tepat. Oleh karena itu, spesifikasi model dan prosedur pemilihan model perlu ditinjau kembali sebelum hasil estimasi dijadikan dasar penarikan kesimpulan penelitian.

4.2 Pembahasan

Pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Elpana et al., 2024) yang menemukan bahwa *Fiscal Stress* berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pemerintah daerah di Sumatera Selatan periode 2018–2022. Hasil ini juga berbeda dengan penelitian (Jayenchi et al., 2026), yang menemukan pengaruh positif dan signifikan, serta (Fitri et al., 2025), yang menemukan pengaruh negatif dan signifikan antara *Fiscal Stress* dan Penyerapan Anggaran.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Penyerapan Anggaran dapat berbeda bergantung pada periode pengamatan, karakteristik pemerintah daerah, dan metode analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini, nilai probabilitas sebesar 0,146579 mengindikasikan bahwa *Fiscal Stress* belum terbukti signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan selama periode penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini belum mendukung hipotesis pertama (H1) dan menunjukkan adanya perbedaan temuan empiris dibandingkan penelitian terdahulu.

Pengaruh SiLPA terhadap Penyerapan Anggaran

Keluaran dari perhitungan statistik SiLPA menujukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar $-1{,}698573 \times 10^{-13}$ dengan nilai probabilitas sebesar 0,018292, yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga, hipotesis kedua (H2) SiLPA berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran didukung.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan SiLPA berkaitan dengan penurunan Penyerapan Anggaran. Meskipun nilai koefisiennya sangat kecil karena perbedaan skala pengukuran, arah hubungan yang ditunjukkan bersifat negatif dan signifikan secara statistik.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Elpana et al., 2024) yang mengkaji pengaruh SiLPA terhadap Penyerapan Anggaran pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian (Hanum & Ramadana, 2025) yang meneliti SiLPA dan Penyerapan Anggaran pada pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, perbandingan arah dan signifikansi hasil secara lebih spesifik perlu disesuaikan dengan temuan masing-masing penelitian terdahulu.

Perbedaan hasil antarpenelitian dapat berkaitan dengan periode pengamatan, karakteristik pemerintah daerah, serta metode

analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini, pengaruh negatif dan signifikan SiLPA menunjukkan bahwa semakin besar SiLPA, semakin rendah Penyerapan Anggaran yang teramati dalam model penelitian. Temuan ini mendukung hipotesis kedua (H2), tetapi tidak dapat langsung diartikan bahwa peningkatan SiLPA menyebabkan penurunan Penyerapan Anggaran.

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran

Kemandirian Keuangan menampilkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Koefisien yang ditampilkan sebesar 0,247377 dengan nilai prob 0,550685, diatas 0,05. Sehingga, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran tidak didukung.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah belum terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Dengan demikian, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah melalui sumber pendapatan sendiri belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat realisasi anggaran dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini perlu dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang menguji hubungan kemandirian keuangan daerah dengan Penyerapan Anggaran. Namun, referensi penelitian terdahulu yang tersedia dalam daftar pustaka belum secara langsung memastikan hasil pengujian variabel tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus menguji kemandirian keuangan agar perbandingan hasil dan signifikansinya akurat.

Pengaruh *Fiscal Stress*, SiLPA, dan Kemandirian Keuangan secara Simultan terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian simultan mengindikasikan *F-statistic* 1,747400 dengan probabilitas sebesar 0,060401. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,060401 > 0,05). Dengan demikian, *Fiscal Stress*, SiLPA, dan Kemandirian Keuangan secara simultan belum terbukti memiliki pengaruh signifikan. Oleh karena itu, H4 tidak didukung pada tingkat signifikansi 5%.

Hasil ini juga menunjukkan ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini belum memberikan bukti statistik yang cukup untuk menjelaskan Penyerapan Anggaran secara bersama-sama pada tingkat signifikansi yang ditetapkan. Meskipun SiLPA menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan secara parsial, hasil pengujian simultan mengindikasikan bahwa signifikansi salah satu variabel secara individual tidak selalu diikuti oleh signifikansi model secara keseluruhan.

Nilai R-squared sebesar 0,408871 menunjukkan bahwa model, termasuk efek tetap daerah sebagaimana dilaporkan dalam hasil estimasi, menjelaskan sekitar 40,89% variasi Penyerapan Anggaran. Sementara itu, sekitar 59,11% variasi lainnya belum dijelaskan oleh model. Namun, nilai R-squared tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa model signifikan secara statistik.

Tidak signifikannya hasil pengujian simultan juga tidak berarti bahwa *Fiscal Stress*, SiLPA, dan Kemandirian Keuangan sama sekali tidak berkaitan dengan Penyerapan Anggaran. Hasil ini perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan spesifikasi model, hubungan antarvariabel independen, serta kemungkinan adanya faktor lain yang berkaitan dengan realisasi anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pengaruh ketiga variabel secara bersama-sama belum memperoleh dukungan statistik yang memadai pada tingkat signifikansi 5%.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh *Fiscal Stress*, SiLPA, dan Kemandirian Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2022–2025, secara parsial hanya SiLPA yang berpengaruh signifikan terhadap

Penyerapan Anggaran. *Fiscal Stress* memiliki koefisien sebesar -1,206237 dengan probabilitas 0,146579, sehingga hipotesis pertama (H1) tidak didukung. Hasil ini berbeda dengan penelitian (Elpana et al., 2024) dan (Jayenchi et al., 2026) yang menemukan pengaruh signifikan *Fiscal Stress* terhadap Penyerapan Anggaran. SiLPA memiliki koefisien sebesar $-1{,}698573 \times 10^{-13}$ dengan probabilitas 0,018292, sehingga hipotesis kedua (H2) didukung. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kurniati et al. (2025) yang menemukan pengaruh negatif SiLPA terhadap Penyerapan Anggaran, tetapi berbeda dengan (Hanum & Ramadana, 2025) yang menemukan bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan.

Kemandirian Keuangan memiliki koefisien sebesar 0,247377 dengan probabilitas 0,550685, sehingga hipotesis ketiga (H3) tidak didukung. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan melalui pendapatan sendiri belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran dalam model penelitian ini. Perbandingan langsung dengan penelitian terdahulu masih terbatas karena sebagian besar penelitian dalam daftar pustaka menguji variabel lain. Penelitian (Amellya et al., 2023) menemukan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran di Aceh, sedangkan (Febiola et al., 2025) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan politik anggaran merupakan faktor yang relevan dalam menjelaskan Penyerapan Anggaran. Perbedaan hasil antarpenelitian dapat berkaitan dengan variabel yang digunakan, periode pengamatan, karakteristik pemerintah daerah, dan metode analisis.

Secara simultan, nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,060401 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis keempat (H4) tidak didukung pada tingkat signifikansi 5%. Nilai R-squared sebesar 0,408871 menunjukkan bahwa model, termasuk efek tetap daerah, menjelaskan 40,89% variasi Penyerapan Anggaran, sedangkan 59,11% sisanya tidak dijelaskan oleh model. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa SiLPA merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penyerapan Anggaran. Namun, hasil tersebut tidak membuktikan hubungan sebab-akibat dan perlu dipahami sesuai dengan karakteristik model serta periode penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada kondisi fiskal dan indikator keuangan daerah dalam upaya meningkatkan Penyerapan Anggaran, tetapi juga memperkuat kualitas perencanaan anggaran, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki koordinasi antarperangkat daerah, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan proses pengadaan barang dan jasa. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel kelembagaan dan nonkeuangan, memperluas wilayah penelitian, serta memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif.

6 DAFTAR PUSTAKA

Amellya, S., Jalaluddin, J., & Batara, G. (2023). What determines budget absorption in local government? Evidence from Aceh Province, Indonesia. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics, 6*(1), 73–83. https://doi.org/10.24815/jaroe.v6i1.29479

Anggraini, M. D., Sari, K. R., & Armaini, R. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 9(1), 111–120.

Arnett, S. (2011). *Fiscal Stress in the U.S. states: An analysis of measures and responses* (Doctoral dissertation, Georgia State University.

Elpana, M. C., Periansya, P., & Dwitayanti, Y. (2024). Pengaruh *Fiscal Stress* dan SiLPA pada penyerapan anggaran pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 8(2), 467–475.

Febiola, F., Periansya, & Fithri, E. J. (2025). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan politik anggaran terhadap penyerapan anggaran di Kota Palembang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 11*(1), 239–253. https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i1.3570

Fitri, F., Yudianto, I., & Mulyani, S. (2025). Pengaruh *Fiscal Stress* dan kapabilitas APIP terhadap penyerapan anggaran pemda di Indonesia. Jurnal Proaksi, 12(2), 345–359. https://doi.org/10.32534/jpk.v12i2.6998

Hanum, M., & Ramadana, S. W. (2025). Pengaruh barang dan jasa, *Fiscal Stress*, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap penyerapan anggaran: Analisis panel data di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal EMT KITA, 9*(3), 1208–1220. https://doi.org/10.35870/emt.v9i3.4473

Hillman, A. J., Withers, M. C., & Collins, B. J. (2009). *Resource Dependence Theory*: A review. Journal of Management, 35(6), 1404–1427. https://doi.org/10.1177/0149206309343469

Jayenchi, M., Maria, M., & Satriawan, I. (2026). Dampak perubahan anggaran, *Fiscal Stress*, dan SiLPA terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah: Studi pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 12(1), 452–464. https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i1.5765

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kurniati, C., Dwitayanti, Y., & Ofasari, D. (2025). Pengaruh *Fiscal Stress*, waktu penetapan anggaran dan SiLPA terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Jurnal Media Akuntansi (Mediasi), 8(1), 159–171. https://doi.org/10.31851/jmediasi.v8i1.19524

Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi 4). UPP STIM YKPN.

Pfeffer, J. (1978). *Organizational design*. AHM Publishing Corporation.